LAPORAN HASIL PELAKSANAAN

SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM)
Triwulan I Tahun 2022

(Januari s/d Maret)

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Alamat : Jalan Sutan Syahrir No. 16

Telp : **Telp. (0561) 732521**

Websi: http://dislautkan.kalbarprov.go.id

e-mail : dkp@kalbarprov.go.id

RINGKASAN EKSEKUTIF

Salah satu upaya untuk memenuhi tuntutan masyarakat dalam hal peningkatan pelayanan publik adalah dengan melakukan survei kepuasan masyarakat kepada pengguna layanan dengan instrumen survei kepuasan masyarakat

Survei Kepuasan Masyarakat pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokarasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik . Unsur SKM meliputi 9 unsur pelayanan yaitu berdasarkan Kesesuaian Persyaratan, Prosedur Pelayanan, Kecepatan Pelayanan, Kesesuaian/Kewajaran biaya, Kesesuaian Pelayanan, Kompetensi Petugas, Perilaku Petugas Pelayanan, Penanganan Pengaduan dan Kualitas Sarana dan Prasarana.

Unsur pelayanan yang proritas untuk ditingkatkan adalah unsur Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana, Prosedur Pelayanan, Kompetensi Petugas, Kesesuaian Pelayanan, Kesesuaian Persyratan, dan Kecepatan Pelayanan sedangkan untuk 3 unsur pelayanan lainnya perlu ditingkatkan dan dipertahankan yaitu Prilaku Petugas Pelayanan, Penanganan Pengaduan dan kesesuaian Atau Kewajaran Biaya.

Hasil Survei Kepuasan Masyarakat triwulan I Tahun 2022 dengan IKM sebesar 88,963 atau katagori SANGAT BAIK.

KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan berkah dan karunianya, sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan hasil pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Triwulan I Tahun 2022 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat. Kegiatan pengukuran Survey Kepuasan

Masyarakat (SKM) bertujuan untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas dan inovasi untuk melaksanakan pelayanan publik selanjutnya dan memberikan gambaran tentang kinerja pelayanan kepada masyarakat

Kami menyadari bahwa hasil dari kegiatan pengukuran SKM ini masih belum sempurna, tapi kami berusaha untuk sedapat mungkin selalu memperbaiki kinerja pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu kami mengharapkan saran dan kritik demi penyempurnaan pelaksanaan kegiatan selanjutnya. Kepada semua pihak yang telah membantu pada saat pelaksanaan kegiatan survei dan penyusunan laporan pelaksanaan SKM ini kami ucapkan terima kasih.

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

H Pontianak, April 2022 Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat

Pembina Utama Muda

NIP. 19680725 199303 2 003

DAFTAR ISI

Ringkasan (Executive Summary)	İ
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	1
C. Maksud dan Tujuan	2
D. Profil Organisasi dan Sumber Aparatur	2
E. Metode	4
F. Tim Survei Kepuasan	5
G. Jadwal Pelaksanaan Survei	5
BAB II ANALISIS DAN HASIL SKM	6
A. Profil dan Data Responden	6
B. Data Kuesioner dan Hasil Perhitungan SKM	7
C. Saran dan Perbaikan dari Responden	8
D. Hasil Analisa	8
BAB III PENUTUP	14
A. Kesimpulan	14
B. Saran	14
LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyelenggaraan Pelayanan Publik masih dihadapkan dengan kondisi yang belum sesuai dengan kebutuhan dan perubahan diberbagai bidang kehidupan. Hal ini ditandai dengan masih adanya keluhan masyarakat yang disampaikan baik secara lisan, tertulis serta melalui media masa dan jejaring sosial sehingga dapat menimbulkan citra yang kurang baik terhadap aparatur pemerintah. Keluhan masyarakat jika tidak ditangani akan memberikan dampak buruk serta dapat menimbulkan ketidak percayaan dari masyarakat.

Salah satu upaya yang harus dilakukan dalam perbaikan penyelenggaraan pelayanan publik adalah dengan mengukur tingkat kepuasan masyarakat atas layanan publik yang diberikan instansi pemerintah dengan instrumen survei kepuasan masyarakat.

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat dalam memperoleh layanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik. Survei Kepuasan Masyarakat pada Dinas Keluatan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat diharapkan dapat menjadi bahan penilaian terhadap unsur pelayanan yang masih perlu diperbaiki dan menjadi pendorong setiap penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan.

B. Dasar Hukum

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038).
- Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);

- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik
- 4. Peraturan Daerah Provinsi Kalimanatan Barat Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaran Pelayanan Publik
- Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2016 tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelengaran Pelayanan Publik.

C. Maksud dan Tujuan

- Maksud Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah sebagai acuan bagi unit pelayanan instansi pemerintah menetapkan kebijakan dalarn rangka peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat. Survei Kepuasan Masyarakat juga digunakan sebagai gambaran tentang kinerja pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kaliamantan Barat.
- 2. Tujuan Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat ini adalah untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan penyelenggaraan pelayanan publik,, serta untuk mendapatkan umpan batik (feedback) secara berkala atas pencapaian kinerja / kualitas pelayanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat, juga sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkesinambungan,

D. Profil Organisasi dan Sumberdaya Aparatur

1. Profil Organisasi

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 129 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat, mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang kelautan dan perikanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Kelutan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan program kerja di bidang perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengolahan dan pemasaran produk kelautan dan perikanan, serta kelautan, pesisir, pulau-pulau kecil, dan pengawasan;
- b. Perumusan kebijakan di bidang perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengolahan dan pemasaran produk kelautan dan perikanan, serta kelautan, pesisir, pulau-pulau kecil, dan pengawasan;
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengolahan dan pemasaran produk kelautan dan perikanan, serta kelautan, pesisir, pulau-pulau kecil, dan pengawasan,
- d. Perigkoordinasian dan pembinaan teknis di bidang kelautan dan perikanan;
- e. Penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang kelautan dan perikanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,
- f. Pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja. Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di Iingkungan Dinas Kelauin dan Perikanan;
- g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kelautan dan perikanan.
- h. Pelaksanaan Administrasi Dinas Kelutan dan Perikanan; dan
- Pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Gubernur di Bidang Kelutan dan Perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Alamat Kantor Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat, Jalan Sutan Syahrir No. 16 Telp (0561) 732521 Kelurahan Sungai Bangkong, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak.

2. Sumber Daya Aparatur

Sumber Daya Manusia pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantana Barat sampai bulan Januari 2022 berjumlah 77 orang dengan rincian sebagai berikut :

SDM Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan, Pangkat Dan Golongan Serta Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional (s/d Desember 2021)

KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JUMLAH PERSONIL		PANGKAT GOLONGAN	JUMLAH PERSONIL		STRUKTURAL /FUNGSIONAL		MLAH RSONIL
1	2	3	4	5	6	7	8	9
S2	13	Orang	Pembina Utama	-	Orang	Esselon II/a	1	Orang
S1 / DIV	42	Orang	Pembina Utama Muda	1	Orang	Esselon III/a	5	Orang
DIPLOMA III	9	Orang	Pembina Tingkat I	5	Orang	Esselon IV/a	15	Orang
DIPLOMA II	-	Orang	Pembina	7	Orang	Fungsional Pengawas Perikanan	7	Orang
SMA/SMK	13	Orang	Penata Tingkat I	23	Orang	Fungsional Umum/ Pelaksana	46	Orang
SMP	-	Orang	Penata	4	Orang	Arsiparis	1	Orang
SD	-	Orang	Penata Muda Tingkat I	11	Orang	Pengendali Hama dan Penyakit ikan	1	Orang
			Penata Muda	12	Orang	Pengelola Ruang Laut dan Pesisir	1	Orang
			Pengatur Tingkat I	13	Orang			Orang
			Pengatur	1	Orang			
JUMLAH	77	Orang	JUMLAH	77	Orang	JUMLAH	77	Orang

E. Metode

Data yang dikumpulkan adalah data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari responden menggunakan kuesioner secara manual dan elektronik dan wawancara. Kuesioner diberikan kepada responden setelah selesai menerima

pelayanan. Pengolahan data dilaksanakan setiap 3 bulan, untuk triwulan I (priode Januri s/d Maret) tahun 2022 jumlah kuesioner yang dibagikan sebanyak 20 untuk 20 responden dan yang diisi dan dikembalikan sebanyak 17 kuesioner, selanjutnya data 17 kuesioner tersebut diperoses lebih lanjut sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

F. Tim Survei Kepuasan

Tim Survei Kepuasan Masyarakat Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 sebagai berikut :

Penanggung Jawab : Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan

Ketua : Sekretaris Dinas

Sekretaris : Kepala Sub Bagian Umum dan Aparatur

Anggota : 1. Sinar Suryadi, S.Pi

2. Sutrisno, S.Pi

3. Dedy Setiadi, S.Sos

4. Felani, AM.d

5. Hj. Marlina

G. Jadwal Pelaksanaan Survei

Survei Kepuasan Masyarakat Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat untuk triwulan I, dilaksanakan pada bulan Januri s/d Maret 2022 dimana kuesioner didistribusikan atau dikirim link kepada penerima layanan setelah memperoleh layanan dari petugas. Pengolahan data dilakukan pada bulan April 2022 oleh tim survei kepuasan masyarakat Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022

5

BAB. II ANALISIS DAN HASIL SKM

A. Profil / Data Responden

Responden kegiatan pengukuran Survei Kepuasan Masyarakat adalah pengguna layanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat yang terdiri dari pelaku usaha perikanan, mahasiswa, nelayan, pegawai swasta dan PNS. Adapun profil responden berdasarkan jenis kelamin, pendidikan, umur dan pekerjaan sebagai berikut :

Nomor Responden	L/P	Pendidikan	Umur (Tahun)	Pekerjaan
1	2	3	4	5
1.	L	SMA	52	Lainnya
2.	Р	SMA	20	Pelajar/Mahasiswa
3.	L	S1	20	Pelajar/Mahasiswa
4.	Р	S1	21	Pelajar/Mahasiswa
5.	L	SMA	21	Pelajar/Mahasiswa
6.	L	SMA	23	Pelajar/Mahasiswa
7.	Р	SMA	30	Wiraswasta
8.	L	SMA	35	PNS
9.	L	SMA	40	Pegawai Swasta
10.	L	S1	41	PNS
11.	L	S1	37	PNS
12.	Р	SMA	21	Pelajar/Mahasiswa
13.	Р	SMA	21	Pelajar/Mahasiswa
14.	Р	D3	21	Pelajar/Mahasiswa
15.	Р	SMA	21	Pelajar/Mahasiswa
16.	Р	SMA	20	Pelajar/Mahasiswa
17.	Р	SMA	21	Pelajar/Mahasiswa

B. Data Kuesioner dan Hasil Perhitungan SKM

Hasil perhitungan Survei Kepuasan Masyarakat triwulan I tahun 2022 dari 17 kuesioner diperoleh nilai masing-masing unsur pelayanan sebagaimana tabel di bawah ini :

NO. RES	NILAI UNSUR PELAYANAN								
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
1	4	4	4	4	4	4	4	4	4
2	3	3	4	4	3	4	4	3	4
3	4	4	4	4	3	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	3	4
5	4	4	4	4	4	4	4	4	4
6	4	4	4	4	4	3	4	3	4
7	4	4	4	4	4	4	4	4	4
8	4	4	4	4	4	3	4	4	3
9	3	3	3	4	3	3	3	3	3
10	4	3	3	4	4	3	4	3	4
11	3	3	3	4	3	3	3	3	3
12	3	3	3	4	3	3	3	3	4
13	4	3	4	4	4	3	4	3	3
14	3	3	3	4	3	4	3	4	4
15	3	3	3	4	3	3	3	3	4
16	3	3	3	4	3	3	3	3	4
17	3	3	3	4	3	3	3	3	4
ΣNilai /Unsur	60	58	60	68	59	58	61	57	64
NRR / Unsur	3,529	3,412	3,529	4,000	3,471	3,412	3,588	3,353	3,765
NRR tertbg/ unsur	0,392	0,379	0,392	0,444	0,385	0,379	0,398	0,372	0,418
IKM Unit pela	yanan							*) 3,559	**) 88,963

Keterangan

- U1 s.d. U9 = Unsur-Unsur pelayanan

- NRR = Nilai rata-rata

IKM = Indeks Kepuasan Masyarakat
 *) = Jumlah NRR IKM tertimbang
 **) = Jumlah NRR Tertimbang x 25

- NRR Per Unsur = Jumlah nilai per unsur dibagi Jumlah kuesioner yang

terisi

- NRR tertimbang = NRR per unsur x 0,111 per unsur

INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT : 88,963 (SANGAT BAIK)

Hasil Rekapitulasi

Nilai rata-rata per unsur pelayanan dan nilai indeks unit pelayanan yang terdiri dari nilai rata-rata usur pelayanan, nilai indeks pelayanan dan pengujian kualitas data (mutu) dengan hasil rekapitulasi sebagai berikut :

NO.	UNSUR PELAYANAN	NRR	IKM	MUTU	KINERJA UNIT PELAYANAN
U1	Kesesuaian Persyaratan	3,529	88	В	Baik
U2	Prosedur Pelayanan	3,412	85	В	Baik
U3	Kecepatan Pelayanan	3,529	88	В	Baik
U4	Kesesuaian/ Kewajaran Biaya	4,000	100	А	Sangat Baik
U5	Kesesuaian Pelayanan	3,471	86,8	В	Baik
U6	Kompetensi Petugas	3,412	85	В	Baik
U7	Perilaku Petugas Pelayanan	3,588	90	А	Sangat Baik
U8	Kualitas Sarana dan Prasarana	3,353	84	В	Baik
U9	Penanganan Pengaduan	3,765	94	Α	Sangat Baik
HA	ASIL SKM / NILAI SKM	3,550	89	В	Sangat Baik

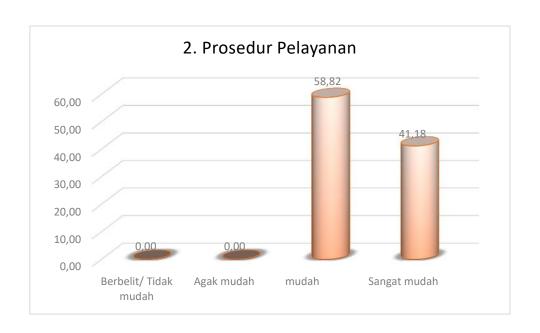
C. Saran Perbaikan dari Responden

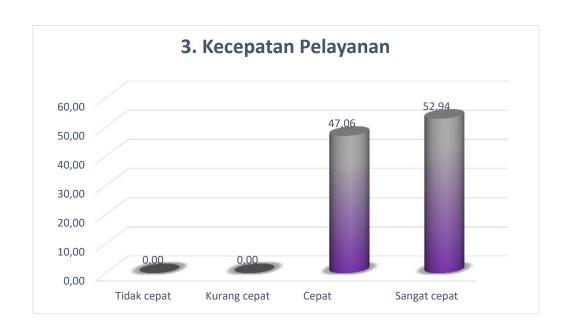
Saran perbaikan yang disampaikan responden melalui kuesioner dan wawancara adalah yang terkait dengan unsur pelayanan kualitas sarana dan prasarana dimana diharapkan adanya peningkatan sarana dan prasarana pendukung pelayanan pada Dinas Keluatan dan Perikanan, dan untuk pelayanan lainnya sudah baik namun perlu ditingkatkan atau dipertahankan.

D. Hasil Analisa

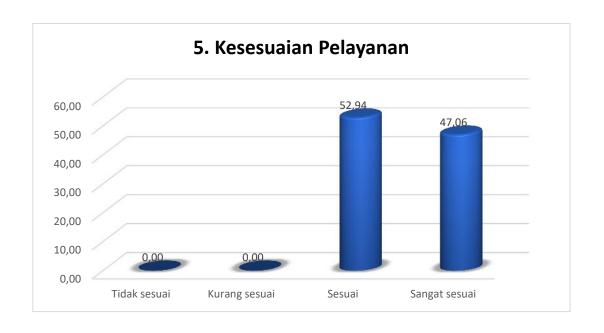
Untuk lebih memahami nilai dari setiap unsur pelayanan akan ditampilkan dalam bentuk grafik dari masing-masing unsur yang disurvei

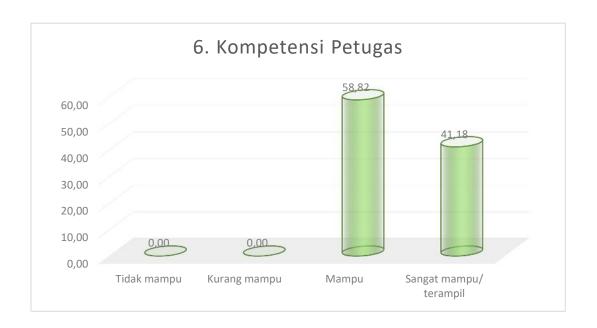


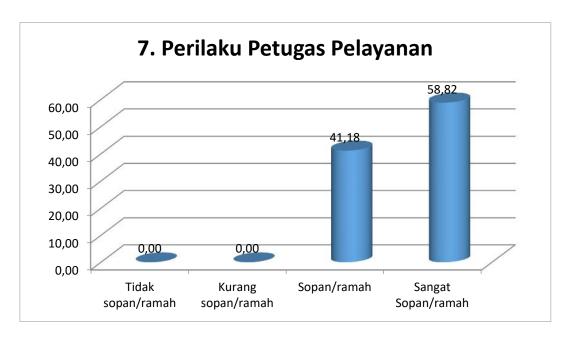




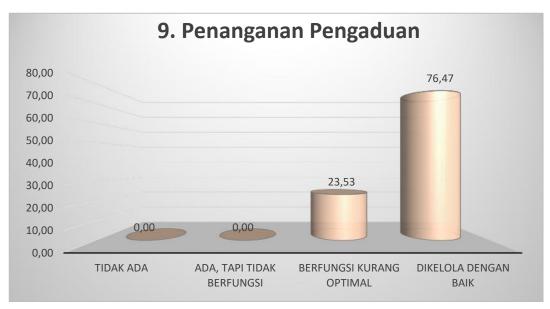












Berdasrarkan hasil analisa data survei kepausan masyrakat di atas, rencana tindak lanjut perbaikan akan dilakukan dengan prioritas dimulai dari unsur yang nilai IKM paling rendah. Adapun rencana tindak lanjut sebagai berikut :

NO.	Prioritas Unsur	Nilai IKM	Keluhan/ Saran	Program / kegiatan	Waktu (tahun)	Penanggung Jawab
1.	Kualitas Sarana dan Prasarana	84	Perlu ditingkatkan	Peningkatan Kualitas Sapras Kantor	2022	Tim Pelayanan Publik DsKP
2.	Prosedur Pelayanan	85	Perlu ditingkatkan	Revisi SOP Menyesuaikan Peraturan Baru	2022	Tim Pelayanan Publik DKP
3.	Kopetensi Petugas	85	Perlu ditingkatkan	Diklat, Bimtek dan Sosialisasi	2022	Tim Pelayanan Publik DKP
4.	Kesesuaian Pelayaan	86,8	Perlu ditingkatkan	Evaluasi Standar Pelayanan	2022	Tim Pelayanan Publik DKP
5.	Kesesuaian Persyaratan	88	Perlu ditingkatkan	Evaluasi Standar Pelayanan	2022	Tim Pelayanan Publik DKP
6.	Kecepatan Pelayanan	88	Perlu ditingkatkan	Revisi SOP Menyesuaikan Peraturan Baru	2022	Tim Pelayanan Publik DKP
7.	Perilaku Petugas Pelayanan	90	Perlu ditingkatkan	Diklat, Bimtek dan Sosialisasi	2022	Tim Pelayanan Publik DKP
8.	Penanganan Pengaduan	94	Perlu ditingkatkan	Bimtek dan Sosialisasi	2022	Tim Pelayanan Publik DKP
9.	Kesesuaian/ Kewajaran Biaya	100	Dipertahan- kan	Dipertahankan	2022	Tim Pelayanan Publik DKP

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengolahan data survei kepuasan masyarakat triwulan I Tahun 2022 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat, nilai ratarata unsur pelayanan berada pada interval 3,353 s/d 4000 atau kinerja pelayanan baik s/d sangat baik

Nilai yang sangat baik, perlu dipertahankan, meliputi unsur pelayanan :

- 1. Kesesuaian/ Kewajaran Biaya
- 2. Penanganan Pengaduan
- 3. Prilaku Petugas Pelayanan

Nilai baik perlu peningkatan, meliputi unsur :

- 1. Kesesuaian Persyaratan
- 2. Kecepatan Pelayanan
- 3. Kesesuain Pelayanan
- 4. Prosedur Pelayanan
- 5. Kompetensi Petugas
- 6. Kualitas Sarana dan Prasarana

Apabila di bandingkan antara hasil survei kepada masyarakat semester II Tahun 2021 maka terdapat peningkatan nilai IKM, dimana pada semester II Tahun 2021 sebesar 88,800 dan trwulan I tahun 2022 sebesar 88,963.

B. Saran

Perlu ada peningkatan kualitas sumber daya manusia berupa Sosialisasi, Diklat atau Bimbingan Teknis kepada petugas pelayan publik dan petugas penyusun laporan survei kepuasan masyarakat di OPD khususnya pada Dinas Kelautan dan Perikanan sebagai penyelenggara pelayanan publik bidang Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat.

LAMPIRAN

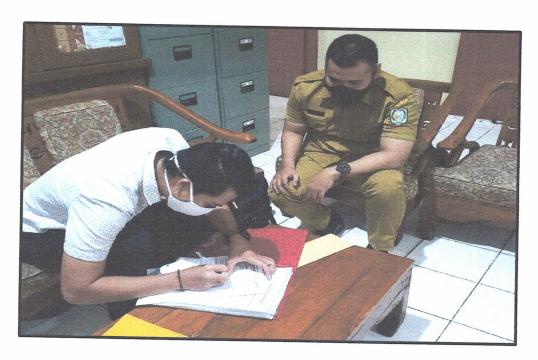
DOKUMENTASI PELAYNAN PUBLIK

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT BULAN JANUARI S/D MARET 2022











PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) TRIWULAN I / TAHUN 2022

Periode Survei: (1 Juli s.d. 31 Desember)

NILAI IKM:

88,963

MUTU PELAYANAN:

Α

KINERJA PELAYANAN:

SANGAT BAIK

JENIS / NAMA LAYANAN : BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

RESPONDEN

JUMLAH: 17 ORANG

JENIS KELAMIN: L = 8 ORANG; P = 9 ORANG

USIA		PENDIDIKAN	PEKERJAAN
18 th : -	orang	SD/MI : -	PNS : 2 orang
		orang	
19 – 25 th: 14	orang	SMP/MTs : -	TNI / POLRI : -
		orang	
26 – 35 th: -	orang	SMA/K/ MA : 12	Peg. Swasta : -
		orang	
36 – 45 th: 1	orang	D-1/ D-3 : 1	Wiraswasta/Usahawan: -
		orang	orang
46 – 55 th: 2	orang	D-4 / S-1 : 4	Pelajar/Mahasiswa : 14 orang
		orang	
56 th :	orang	S-2 : -	Lainnya : 1 orang
		orang	

TERIMA KASIH ATAS PENILAIAN YANG TELAH ANDA BERIKAN; MASUKAN ANDA SANGAT BERMANFAAT UNTUK KEMAJUAN PELAYANAN PUBLIK KAMI AGAR TERUS MEMPERBAIKI DAN MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN BAGI MASYARAKAT